Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
Vol. 7. No. 1, Februari 2025, 31-49
ISSN 2686-1836 (Print), ISSN 2716-0742 (*Online*)
Available Online at http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP
Department of Management of Public Security and Safety,
Faculty of Community Safety and Protection,
Institute of Home Affairs Governance (IPDN)
DOI: https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5204
Received: 2025-02-05; Accepted: 2025-09-29; Published: 2025-10-02

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN

Daffa Andika Nasution[1], Mulyana[2,3]
[1]Pemerintah Kota Gunungsitoli
[2]Institut Pemerintahan Dalam Negeri
[3]corresponding author: mulyana@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait program keluarga harapan. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan masih minim dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip kesetaraan menunjukan bahwa para keluarga penerima manfaat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan, semua hal tersebut bisa semakin teratasi dan mudah diakses. Prinsip partisipasi menunjukan para pelaksana serta sasaran penerima manfaat program keluarga harapan saling terlibat dalam setiap pelaksanaan kebijakan PKH. Namun, pada prinsip kemandirian, kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan utama yang berkaitan dengan mindset penerima manfaat yang kurang inovatif dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah, sedangkan pada prinsip keberlanjutan masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan pada aspek perubahan mindset para penerima manfaat dan penguatan sarana prasarana.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat.

Copyright (c) 2025 Daffa Andika Nasution, Mulyana

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

One of the efforts made by the Government of Indonesia in dealing with poverty issues is by issuing policies related to the Family Hope Program. The beneficiary families of the Family Hope Program in Medan Belawan Sub-district, Medan City, have increased in the last three years, but there is still a lack of research on community empowerment through the Family Hope Program. Therefore, this study aims to obtain an overview of community empowerment through the family of hope program in Medan Belawan Sub-district. The research method is qualitative with data collection through semi-structured interviews, observation, and documentation. The results showed that there are four principles of empowerment applied in community empowerment through the family of hope program, namely the principles of equality, participation, independence, and sustainability. The principle of equality shows that beneficiary families who previously had difficulty in meeting their daily needs, difficulty in obtaining health and care facilities, and difficulty in meeting their children's educational needs, by getting help from the family of hope program, all of these things can be increasingly resolved and easily accessed. The principle of participation shows that the implementers and target beneficiaries of the family of hope program are mutually involved in every implementation of the PKH policy. However, in the principle of independence, community empowerment activities face major challenges related to the mindset of beneficiaries who are less innovative and tend to depend on government assistance, while the principle of sustainability still faces the problem of limited facilities and infrastructure. In conclusion, community empowerment through the Family Hope Program in Medan Belawan Sub-district is quite well implemented, and requires improvement in the aspect of changing the mindset of beneficiaries and strengthening infrastructure.

Keywords: Family Hope Program, Community Empowerment, Beneficiary Families.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia berkembang menjadi isu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Kemiskinan tetap menjadi isu yang perlu diselesaikan, meskipun pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan angka yang positif. Berbagai aspek dinilai dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian isu kemiskinan. Sebagaimana disebutkan oleh Pardita et al. (2024), bahwa salah satu aspek yang berkorelasi terhadap penurunan kemiskinan adalah adanya perbaikan indeks pembangunan manusia. Di sisi lain, adanya peningkatan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan pun menjadi aspek yang penting dalam penyelesaian isu kemiskinan (Mutmainah et al., 2024), bahkan Nasution et al. (2024) menambahkan aspek peluang ekonomi dan harapan hidup, ke dalam aspek yang dapat menangani kemiskinan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemeirntah Indonesia dalam rangka menyelesaikan isu kemiskinan adalah

dengan meengimplementasikan program keluarga harapan (PKH), yang kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018. PKH disebut sebagai program bantuan sosial yang ditujukan bagi seseorang yang memenuhi kriteria tertentu diantaranya merupakan yang terdaftar pada data terpadu program penanganan kemiskinan, dan tujuan PKH adalah meningkatkan taraf kehidupan keluarga individu tersebut agar dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikanm kesejahteraan sosial, dan kesehatan (Mahmud et al., 2020).

Salah satu daerah yang juga masih menghadapi isu kemiskinan adalah Kota Medan. Salah satu kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Medan adalah Kecamatan Medan Belawan. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2019	15.374
2020	15.097
2021	22.817
2022	24.729

Sumber: Medan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan yang drastis, terutama tahun 2020-2022. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 15.374 jiwa. Selanjutnya di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15.097 jiwa. Kemudian di tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan drastis menjadi 22.817 jiwa. Selanjutnya tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi 24.729 jiwa.

Tabel 2. Data Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Medan Belawan

Tahun	Keluarga Penerima Manfaat (Jiwa)
2020	5.948
2021	6.582
2022	6.767

Sumber: BPS Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Dalam PKH, Dinas Sosial Kota Medan sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari PKH. PKH tidak hanya merupakan program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat menjadi aspek penting dilakukan di dalam implementasi program PKH, dengan tujuan agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masing-masing.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang PKH, cukup banyak telah dilakukan. Sebagaimana penelitian Khotijah et al. (2024) yang meneliti PKH dari aspek efektifitasnya. Di sisi lain, PKH juga telah dikaji dari sisi implementasi (Lelangona et al., 2024; Mubarak, 2024), partisipasi (Nursam et al., 2024), strategi (Khouru, 2024; Sukri et al., 2024), peran dari pemerintah daerah dalam penerapan PKH tersebut (Liani, 2024), hingga evaluasinya (Oktarina et al., 2022). Adapun kajian yang secara spesifik membahas dari sisi pemberdayaan masyarakat masih minim dilakukan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan? Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulida, 2024). Mardikanto & Soebianto (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang di dalamnya terdapay pelibatan penguatan kapasitas individu, kelembagaan, dan jejaring. Di sisi lain, Najiati et al. (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat yaitu, prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan kemandirian masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Sementara itu, program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan pada individu yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Pelaksanaan

program tersebut juga telah digunakan di negara-negara lain, seperti Meksiko, Brasil, dan Filipina, yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer,* dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan bantuan bersyarat kepada individu yang kurang beruntung secara ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Yusriadi (2020) menjelaskan bahwa PKH pertama kali didirikan pada tahun 2007 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai program penanggulangan kemiskinan, PKH berfokus pada fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial dari sudut partisipan, dan berfokus pada pemahaman mendalam terkait pengalaman dan makna yang terlibat pada fenomena yang dikaji (Nartin, et.al., 2024). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan beberapa informan yang dianggap berkompeten pada bidangnya. Informan yang telah ditentukan diharapkan oleh peneliti mampu memberikan data yang dibutuhkan sehingga dapat memperlancar dan mempermudah jalannya penelitian. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Sosial Kota Medan dipilih karena merupakan pengawas dan penanggung jawab PKH sesuai perintah Kementerian Sosial RI; Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dipilih karena bidang yang membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan PKH dalam penanggulangan kemiskinan; Koordinator PKH Kota Medan dipilih karena turun langsung dalam pelaksanaan PKH bersama pendamping PKH setiap kecamatan; Koordinator pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dipilih karena pendamping ini yang membantu dan turun langsung ke lapangan bersama Koordinator PKH; dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sebagai penerima bantuan sosial berbasis keluarga PKH. Penelitian ini mempedomani konsep pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Najiyati (2006) bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi.

Adapun analisis data dilakukan melalui reduksi, *display*, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Adapun validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan strategi untuk memastikan keabsahan data dengan melihatnya dari berbagai perspektif guna meminimalkan ambiguitas dan makna ganda selama proses pengumpulan dan analisis data (Alfansyur & Mariyani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan

Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila pemberdayaan masyarakat miskin berjalan sesuai peraturan yang ada. Peneliti dalam hal ini menggunakan prinsip pemberdayaan menurut Najiyati (2006) antara lain: Prinsip Kesetaraan, Prinsip Partisipasi, Prinsip Kemandirian, dan Prinsip Berkelanjutan. Uraian hasil penelitian adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Kesetaraan

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan diinformasikan bahwa PKH merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Dinas Sosial mengupayakan yang terbaik dalam penerapannya. Hal tersebut diwujudkan melalui arahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kota Medan, kepada seluruh jajaran terkait agar memiliki persepsi tujuan yang sama dalam mengimplementasikan program tersebut. Senada dengan itu, informan lainnya pun menyatakan hal yang sama, bahwa adanya PKH dapat menyelaraskan hak dan kewajiban bagi keluarga miskin di Kecamatan Medan Belawan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan dari berbagai pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat dalam PKH di Kecamatan Medan Belawan. Dinas Sosial Kota Medan, bersama dengan koordinator dan pendamping PKH, berperan aktif untuk memastikan bahwa PKH dapat terselenggara sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, baik dalam aspek administrasi maupun saat pelaksanaannya di lapangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Sa'adiyyah & Mulyasari (2024) yang menyatakan bahwa adanya komunikasi yang terselenggara secara efektif antara Dinas Sosial dengan berbagai pihak yang terlibat dalam PKH, dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program. Di sisi lain, melalui komitmen

positif yang dimiliki oleh Dinas Sosial, maka diharapkan dapat tersampaikan segala informasi terkait PKH kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria (Aritonang & Trimurni, 2024).

Pemberdayaan masyarakat melalui PKH tergambarkan melalui upaya pendampingan yang diharapkan dapat mendorong penerima manfaat melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan haknya secara berkala dan berkelanjutan. Adapun pelaksana PKH baik dari Dinas Sosial maupun dari pihak kecamatan telah mengoordinasikan dan mensosialisasikan terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang mencerminkan prinsip kondisionalitas, yaitu bantuan diberikan dengan syarat bahwa penerima manfaat dapat memenuhi kewajiban tertentu dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Nabella & Rahmadanita, 2024), di samping adanya aspek partisipasi masyarakat (Azzura & Mulyana, 2024).

b. Prinsip Partisipasi

Berkenaan dengan prinsip partisipasi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, S. Sos, S.E, M.M pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.00 WIB. Beliau menjelaskan prinsip partisipasi dari segi indikator perencanaan diketahui informasi bahwa Dinas Sosial Kota Medan rutin mengadakan pertemuan dengan para pendamping PKH di setiap kecamatan, terutama di Kecamatan Medan Belawan, untuk membahas berbagai aspek program. Pertemuan yang melibatkan koordinator dan pendamping PKH itu bertujuan untuk merencanakan penyaluran dana bantuan, kegiatan P2K2 bersama KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan.

Kemudian salah satu Koordinator PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy Sitorus, S. Ag pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 08.00 WIB dalam wawancara terkait prinsip partisipasi dari segi indikator pelaksanaan diketahui informasi bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan langsung dari Kementerian Sosial RI yang pelaksanaannya ditugaskan kepada dinas sosial di daerah. Dinas Sosial Kota Medan

pun bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kebijakan tersebut sebaik mungkin. Selain itu, Dinas Sosial Kota Medan juga menyelaraskan program ini dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung PKH. Pemerintah Kota Medan juga berupaya memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar ikut aktif dalam menyukseskan program tersebut. Tujuannya adalah untuk menuntaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Ronald Fredy Sihotang, S. IP, M. Si pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, terkait prinsip partisipasi dari segi indikator pengawasan diketahui bahwa selain melaksanakan program, para pelaksana PKH di Medan juga bertugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya kebijakan ini. Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh pendamping PKH, maka dapat ditindak tegas sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pedoman dan kode etik. Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), ada kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar penerima. Namun, keputusan akhir untuk mengeluarkan atau mempertahankan KPM berada sepenuhnya di tangan Kementerian Sosial. Pihak pelaksana PKH di daerah hanya bisa memberikan rekomendasi.

Koordinator pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan Ibu Rauni Rasoky Pulungan dalam wawancara pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 10.00 WIB juga mengatakan terkait prinsip partisipasi dari segi evaluasi bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk PKH, selalu dievaluasi secara rutin. Berdasarkan jadwal pencairan dana yang dilakukan setiap tiga bulan, evaluasi pasti diadakan setelahnya. Tujuannya adalah untuk memastikan pencairan berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lancar. Secara spesifik, PKH di Kecamatan Medan Belawan dievaluasi setiap triwulan. Evaluasi tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pencairan dana bantuan, kegiatan pendukung kebijakan, hingga kinerja para pelaksana program.

Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang kesejahteraan sosial Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Bapak Ayong Putra Pribadi (39 tahun) pada saat peneliti wawancara di rumahnya, diketahui bahwa salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga PKH juga selalu mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan sesuai arahan dari pendamping

PKH saat pertemuan. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewajiban penerima manfaat sejak pertama kali menerima bantuan. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, penerima manfaat bisa mendapatkan hak-hak dari bantuan PKH untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 3. Jadwal Evaluasi PKH di Kecamatan Medan Belawan Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu
1.	Evaluasi Triwulan I	26 Maret 2024
2.	Evaluasi Triwulan II	25 Juni 2024
3.	Evaluasi Triwulan III	24 September 2024
4.	Evaluasi Triwulan IV	20 Desember 2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan, diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prinsip partisipasi yang meliputi indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi menunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sudah berjalan baik dan lancar sesuai prinsip tersebut. Dimana antara Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan serta koordinator dan pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan semuanya saling terlibat dan berperan sesuai tugas masing-masing. Bahkan para KPM juga ikut membantu tugas dari para pelaksana kebijakan PKH ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaksana program berupaya untuk memastikan kelancaran program. Aspek perencanaan digambarkan melalui kehadiran Dinas Sosial Kota Medan yang secara rutin mengadakan pertemuan dengan pendamping PKH terkait dengan pelaksanaan program. Aspek pelaksanaan tergambarkan melalui adanya keselarasan aturan yang memayungi pelaksanaan tersebut, yang meliputi partisipasi aktif dari berbagai pihak. Aspek pengawasan ditunjukkan oleh adanya sanksi bagi pelaksana apabila melanggar kode etik. Sedangkan aspek evaluasi digambarkan melalui kegiatan berkala setiap triwulan dalam rangka peningkatan efektivitas program.

Aspek pengawasan dan evaluasi merupakan dua aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan suatu program. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Mellani (2022) pun menyatakan bahwa pengawasan yang kurang dari pemerintah pada pelaksanaan PKH, dapat menjadi faktor yang menghambat kelancarannya. Penguatan pengawasan pada PKH dapat menjadi upaya efektif untuk mencegah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program (Risyanti, 2024). Di samping itu, dari hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan, dapat menjadi pedoman bagi pelaksana

program untuk menentukan langkah berikutnya yang dapat diambil (Bita et al., 2024).

c. Prinsip Kemandirian

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, S. Sos, S.E, M.M pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.00 WIB. Beliau menjelaskan prinsip kemandirian dari segi indikator kemampuan pengambilan Keputusan, diketahui informasi bahwa kebijakan PKH merupakan program langsung dari Kementerian Sosial RI yang pelaksanaannya dilimpahkan ke Dinas Sosial di setiap daerah. Terlepas dari apa pun kebijakannya, dinas sosial harus melaksanakannya sebaik mungkin karena itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Medan memiliki peran penting sebagai perangkat daerah yang menaungi berbagai jenis bantuan sosial, termasuk PKH. Dinas Sosial memberikan wewenang kepada koordinator dan pendamping PKH di Kecamatan Medan Belawan untuk menjadi pelaksana lapangan yang berinteraksi langsung dengan KPM.

Memperkuat pendapat di atas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Ronald Fredy Sihotang, S.IP, M.Si pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa Dinas Sosial, melalui koordinator dan pendamping PKH, berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kegiatan P2K2, tim tersebut memberikan saran, masukan, materi, serta membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan program. Kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk membimbing dan mengingatkan kembali para KPM mengenai hak dan kewajiban. Tujuannya adalah agar KPM dapat memanfaatkan dana bantuan PKH secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian salah satu Koordinator PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy Sitorus, S.Ag pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 08.00 WIB dalam wawancara terkait prinsip kemandirian dari segi indikator kemampuan produktivitas, diketahui bahwa para koordinator PKH memberikan informasi dan dorongan kepada orang tua penerima manfaat agar tidak hanya sekadar menerima dana bantuan. Para koordinator PKH menyarankan dan membantu para penerima untuk mengelola dana tersebut agar bisa digunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan. Tujuannya adalah agar Keluarga Penerima Manfaat bisa memperoleh penghasilan tambahan,

sehingga ke depannya dapat meningkatkan taraf hidup dan menuntaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan.

Koordinator pendamping PKH di Kecamatan Medan Belawan Ibu Rauni Rasoky Pulungan dalam wawancara pada hari Rabu, 10 Januari pukul 10.00 WIB juga mengatakan terkait prinsip kemandirian dari segi indikator kemampuan produktivitas, diketahui bahwa Para pendamping PKH rutin memberikan saran kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap kali pertemuan P2K2 diadakan. Para pendamping PKH menyarankan KPM untuk memanfaatkan dana bantuan PKH tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk kegiatan lain yang bisa menambah pemasukan keluarga. Tujuannya adalah agar KPM dapat mengelola dana bantuan tersebut secara lebih baik dan tepat, sehingga bisa lebih berkembang secara ekonomi.

Selanjutnya salah seorang Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang kesejahteraan sosial Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Bapak Ayong Putra Pribadi (39 tahun) pada saat peneliti wawancara di rumahnya, diketahui bahwa seorang Keluarga Penerima Manfaat mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapatkan bantuan PKH. Meskipun dana tersebut tidak dapat menutupi seluruh pengeluaran, tetap diupayakan memanfaatkannya untuk memulai usaha warung kelontong secara bertahap. Berkat usaha tersebut, saat ini ia dan keluarganya mulai mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala utama dalam pemberdayaan masyarakat pada PKH diantaranya adalah meskipun telah diberikan motivasi dan arahan melalui kegiatan pertemuan Peningkatan Kemampuan Berkeluarga (P2K2), namun terdapat kurangnya inovasi dan keberanian KPM dalam berwirausaha. Hal tersebut disebabkan oleh mindset yang tertanama pada diri KPM tersebut. Mindset yang beranggapan bahwa KPM tidak memiliki kecakapan dalam berwirausaha, dan lebih nyaman dengan kondisi menerima bantuan. Di sisi lain, adanya ketergantungan terhadap bantuan PKH pun menjadi penyebab dari kendala tersebut. Dengan demikian, meskipun kondisi ekonomi PKH telah membaik, namun PKH tetap enggan untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya menjadi lebih baik lagi. Peneliti berpendapat bahwa, tantangan utama dalam pemberdayaan KPM tersebut tidak hanya persoalan terbatasnya ekonomi, tetapi juga adanya persoalan dari aspek

psikologis dan karakter sosial, yang mengharuskan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka mengubah *mindset* KPM sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat KPM tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kaisar & Rahmah (2024)yang juga menemukan bahwa adanya persoalan pola pikir (*mindset*) dari penerima manfaat PKH, yaitu sering terjadinya penyalahgunaan bantuan PKH yang diterima. Di samping itu, juga terjadi persoalan pola pikir masyarakat yang cenderung bergantung pada bantuan yang diberikan (Hartadi et al., 2024). Bahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, Hidayatingsih & RofiqSofa (2025) menyatakan bahwa adanya pendidikan karakter islami dapat mendorong perubahan pola pikir dari ketergantungan pada bantuan sosial menjadi produktif dan mandiri.

Hasil penelitian ini menunjukan adanya *mindset* dari KPM yang kurang inovasi, untuk itu peneliti mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan pendamping PKH di Kecamatan Medan Belawan, diantaranya: 1) penguatan edukasi dan pelatihan kewirausahaan dengan metode yang lebih aplikatif; 2) menyelenggarakan program psikososial dengan pelibatan tokoh masyarakat dan mentor bisnis agar semangat kewirausahaan dapat dimiliki oleh para KPM; 3) insentif bertahap bagi KPM yang dapat mewujudkan progress kepercayaan diri dan semangat berwirausaha; 4) pemberian sertifikasi keterampilan dan akses ke pasar kerja bagi KPM di Kecamatan Medan Belawan. Peneliti berpendapat bahwa persoalan terkait dengan *mindset* tersebut dapat ditindaklanjuti dengan upaya serius, berkala, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui PKH dapat mencapai hasil yang lebih baik, yaitu mampu mewujudkan masyarakat lebih mandiri dan inovatif.

d. Prinsip Keberlanjutan

Berkaitan dengan prinsip berkelanjutan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, S.Sos, S.E, M.M pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.00 WIB. Beliau menjelaskan prinsip berkelanjutan dari segi indikator pengelolaan sumber daya, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan PKH menghadapi beberapa kendala, terutama terkait teknologi dan anggaran. Dari segi teknologi, sempat terjadi kendala saat aplikasi e-PKH diperbarui menjadi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial-Next Generation) yang digunakan untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sementara itu, terkait anggaran, koordinator dan pendamping PKH sering kali harus menggunakan dana pribadi untuk kegiatan operasional di lapangan. Terkait sumber daya anggaran, terdapat dana sharing dari daerah, selama ini digunakan untuk mendukung sarprasnya para pendamping PKH, seperti kendaraan. Tidak diberikan kepada KPM, tetapi untuk mendukung sarana dan prasana pendamping.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Ronald Fredy Sihotang, S.I P, M. Si pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.00 WIB menambahkan pendapat di atas, diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak mengalami kendala terkait sumber daya manusia karena jumlah pegawai, koordinator, dan pendamping PKH yang memadai. Dengan jumlah yang cukup, para pelaksana program dapat saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan kebijakan ini. Selain itu, juga saling mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Menambahkan penjelasan di atas pula, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, S. Sos, S.E, M.M pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.00 WIB. Beliau menjelaskan prinsip berkelanjutan dari segi indikator keberlangsungan program diketahui bahwa kelanjutan kebijakan PKH sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial RI. Namun, pihak pelaksana di daerah berharap program ini dapat terus berlanjut. PKH merupakan kebijakan yang sudah berjalan sejak 2007 dan keberhasilannya hingga saat ini berkat peran serta dan dukungan dari semua pihak, baik pelaksana maupun para penerima bantuan.

Memperkuat pendapat di atas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Ronald Fredy Sihotang, S. IP, M. Si pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan membawahi berbagai jenis bantuan pemerintah, dan PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan. Oleh karena itu, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan sangat berharap kebijakan PKH ini dapat terus berlanjut.

Selaras pula dangan yang disampaikan oleh salah satu Koordinator PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy Sitorus, S. Ag pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 08.00 WIB dalam wawancara diketahui bahwa seorang koordinator PKH di Kota Medan berharap kebijakan PKH dapat terus berlanjut. Menurutnya, program ini memberinya kesempatan untuk membantu orang lain dan memahami permasalahan masyarakat, terutama para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), secara langsung.

Selanjutnya ditambahkan oleh salah seorang Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Ibu Upik Nur Jannah pada saat peneliti, diketahui bahwa salah satu KPM berharap agar bantuan PKH dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah. Sebagai orang tua dengan komponen pendidikan, ia sangat menginginkan anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Menurutnya, KPM bukan berharap untuk terus-menerus menerima bantuan, melainkan berharap bantuan ini bisa meningkatkan taraf pendidikan anak-anak. Bantuan PKH memberikan semangat dan motivasi agar anak-anak rajin sekolah dan tidak khawatir dengan biaya pendidikan, sehingga anak-anak bisa mengejar cita-cita setinggi mungkin.

Para KPM sudah berusaha menjadi lebih baik dalam hal pengelolaan dana bantuan PKH, tetapi KPM juga ingin kebijakan PKH bisa terus berlanjut khususnya para KPM bidang pendidikan. Dimana KPM menginginkan kebijakan PKH khususnya bidang pendidikan bisa terus lanjut sampai jenjang pendidikan tertinggi. Tujuannya juga untuk meningkatkan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat melalui PKH tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ramdan (2024) yang menyatakan bahwa adanya PKH dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam aspek peningkatan ekonomi, akses pendidikan, dan kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dari aspek sarana dan prasarana yang belum memadai.

Terbatasnya sarana dan prasarana bagi pendamping PKH di Kecamatan Medan Belawan menjadi aspek yang perlu diselesaikan agar keberlanjutan dari PKH dapat terselenggara dengan baik. Meskipun Pemerintah Kota Medan telah memberikan bantuan berupa laptop dan kendaraan dinas secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, pendamping masih menghadapi kendala dalam hal akomodasi dan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai. Hasil penelitian ini senada dengan temuan penelitian sebelumnya

bahwa adanya keterbatasan sarana prasarana dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (Deswita & Ariany, 2024), dan kemudahan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang dapat mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat (Hasanurrizqi & Rahmadanita, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan peningkatan dukungan sarana dan prasarana bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk penyediaan anggaran khusus untuk akomodasi, fasilitas kerja yang lebih memadai, serta peningkatan kapasitas pendamping agar dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam PKH di Kecamatan Medan Belawan.

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terselenggara dengan cukup baik. Prinsip kesetaraan menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan serta koordinator dan pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan bahkan para Keluarga Penerima Manfaat juga semuanya saling membantu dan bekerja sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Prinsip partisipasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan serta koordinator dan pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan semuanya saling terlibat dan berperan sesuai tugas masing-masing. Bahkan para KPM juga ikut membantu tugas dari para pelaksana kebijakan PKH ini. Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa para pelaksana PKH sudah memberikan berbagai saran dan masukannya untuk para Keluarga Penerima Manfaat, sisanya bagaimana para KPM menerima dan memanfaatkan kesempatan yang ada guna bersama-sama meningkatkan taraf hidup. Namun, masih terdapat tantangan rendahnya kepercayaan diri KPM, yang menunjukkan adanya persoalan dari aspek psikologis dan karakter sosial, dan mengharuskan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka mengubah *mindset* KPM sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat KPM tersebut. Prinsip berkelanjutan menunjukkan bahwa para pelaksana PKH dan para Keluarga Penerima Manfaat menginginkan kebijakan PKH terus berlanjut, yang artinya pemberdayaan masyarakat (KPM) berhasil sesuai peraturan dan pedoman. Selanjutnya para pelaksana dan KPM

saling mendukung dan membantu bersama-sama meningkatkan taraf hidup. Namun keterbatasan sarana dan prasarana pendamping PKH masih terjadi. Para pendamping PKH mengeluarkan biaya akomodasi pelaksanaan PKH bidang pendidikan secara pribadi, padahal dari beberapa pendamping PKH masih adanya pendamping yang juga masuk komponen penerima PKH. Adapun rekomendasi ini adalah disarankan Dinas Sosial beserta pelaksana PKH dapat memperkuat aspek monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan pendukung PKH kepada para KPM, dan dapat menyusun prioritas pengaturan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi sebagai faktor pendukung pelaksanaan PKH di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. HISTORIS: *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5*(2). https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432

Aritonang, P. A. R., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, *4*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.556

Azzura, A. N., & Mulyana. (2024). Community Empowerment By The Tourism Office In The Development Of Sade Tourism Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 6*(1). https://doi.org/10.33701/jpkp.v6i1.4098

Bita, A., Rifai, M., & Hardianto, W. T. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(2). https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/892/780

Deswita, R., & Ariany, R. (2024). Analisa Dampak Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. *Journal Publicuho*, *7*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.492

Hartadi, M. I., Arif, A., & Poerwanti, S. D. (2024). Menguak Hambatan Graduasi: Dinamika Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm). *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*,

6(1). https://doi.org/https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1132

Hasanurrizqi, M., & Rahmadanita, A. (2018). Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Kube Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, *3*(1), 1–12. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/858

Hidayatingsih, N., & RofiqSofa, A. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Islami dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Desa Dawuhan. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.494

Kaisar, P., & Rahmah, S. (2024). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, *3*(1). https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/view/830

Khotijah, S., Indartuti, E., & Rahmadanik, D. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(7). http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1776

Khouru, A. N. (2024). *Strategi Program Keluarga Harapan (pkh) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/87381/

Lelangona, M. S. R., Ballo, F. W., & Molidya, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(09). https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1173

Liani, L. S. (2024). *Peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Menyejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang)* [UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.]. http://repository.uinbanten.ac.id/14435/

Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *6*(1). https://doi.org/ttps://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* . Alfabeta.

Maulida, F. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Islam Pada Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung* [Uin Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/32937/

Medan, B. K. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin*. Medan, BPS Kota. https://medankota.bps.go.id/indicator/23/88/1/jumlah-penduduk-miskin.html

Mellani, W. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/10822/

Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.

Mubarak, M. A. (2024). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Barito Utara* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/18663/

Mutmainah, S., Rahayu, N. W., Fauzan, F., & Sholichin, A. A. (2024). The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art20

Nabella, M., & Rahmadanita, A. (2024). Community Empowerment Through Creative Economy Enterprises In Creating Tourism Villages. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP),* *6*(1). https://doi.org/10.33701/jpkp.v6i1.4088

Najiati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Wetlands International.

Nartin., Faturrahman., Deni, A., Santoso, Y,H., Paharuddin., Suacana, I. W. G., Indrayani, E., Utaman, F. Y, Tarigan, W. J., Eliyah. (2024). *Metode Peneltiian Kualitatif*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Nasution, M., Lubis, S. N., & Kesuma, S. I. (2024). Analysis of Socio-economic Variables Impacting Poverty Alleviation in Regional Development: A Case Study in Deli Serdang Regency, Indonesia. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, *21*(10). https://doi.org/10.9734/sajsse/2024/v21i10894

Nursam, N., Sawir, M., Kahar, A., Nuraini, A., Iqbal, M., & Safar, A. W. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Tolis Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1). https://doi.org/ttps://doi.org/10.56630/tm.v2i1.548

Oktarina, V., Karlina, N., & Candradewini, C. (2022). Evaluasi

Konteks Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, *14*(1). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41324

Pardita, D. P. Y., Darma, I. K., Putra, I. K., & Purnami, A. A. S. (2024). Human Development and Poverty in Indonesia. *JEFMS Journal*, *07*(08). https://doi.org/https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i8-08

Ramdan, S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/83210/

Risyanti, C. N. (2024). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pungutan Dana Pkh Dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif Di Kecamatan Cireunghas)* [Universitas Nusa Putra Sukabumi]. https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1056/1/CHITRA NUR RISYANTI.pdf

Sa'adiyyah, A. M., & Mulyasari, N. (2024). Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Kadumerak Tahun 2022. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, *7*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3583

Sukri, S., AB, S., & Fachri, H. (2024). Strategi Komunikasi Efektif Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Telangke:Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*, *6*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jiksohum.v6i1.945

Yusriadi. (2020). *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan Dan Sociopreuneur.* Deepublish.